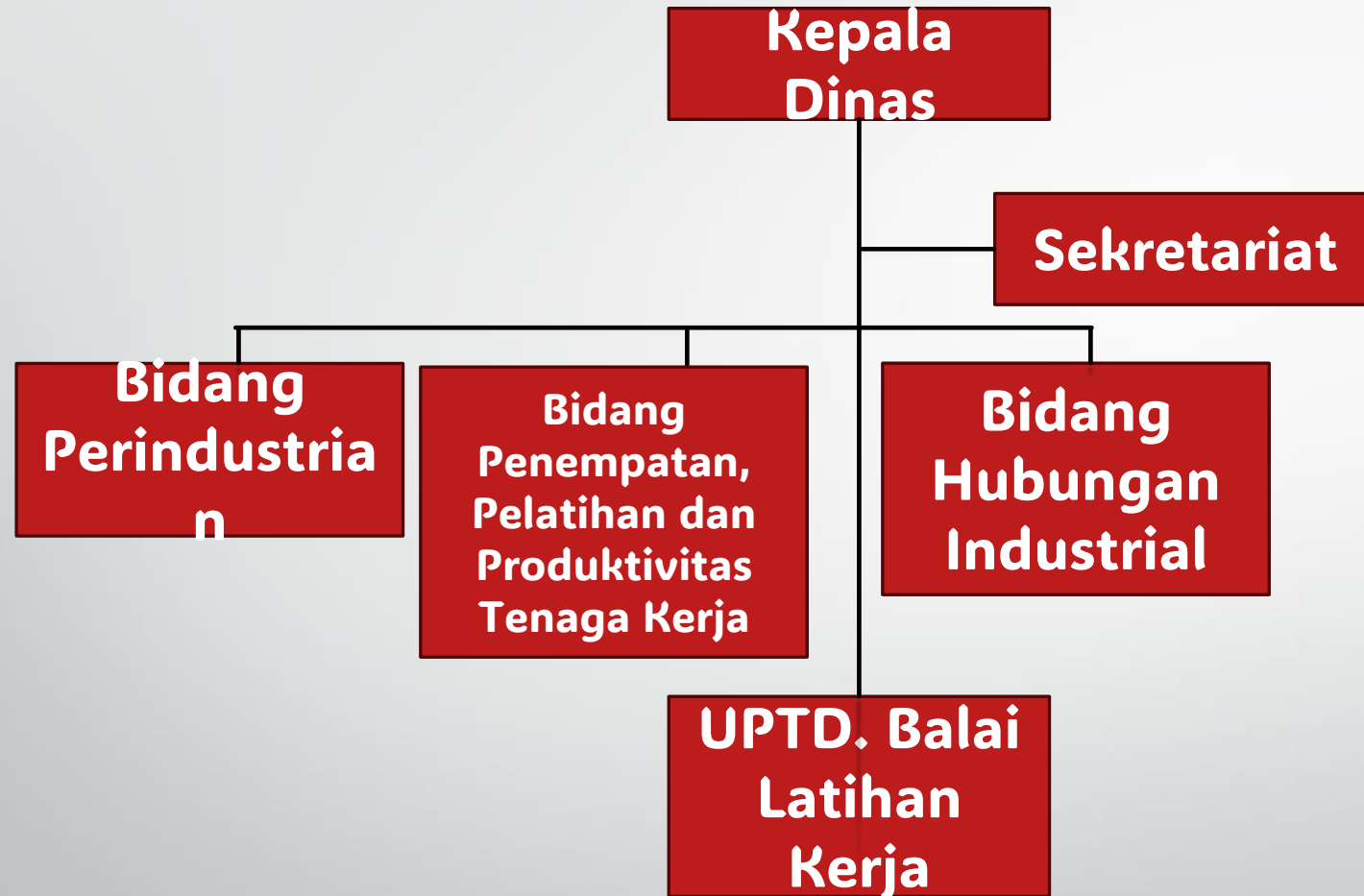




PAPARAN SAKIP TAHUN 2025 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA PROBOLINGGO

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



URAIAN	Jumlah
PNS	47
Non ASN	15
PPPK	-
Total	62

CASCADING

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO YANG INKLUSIF,
BERSAYA SAING DAN BERKELANJUTAN

VISI
RPJMD

1. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN,
DAYA SAING EKONOMI DAERAH
2. MEWUJUDKAN PEMANTAPAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS
HIDUP MASYARAKAT

MISI
RPJMD

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI
OPTIMALISASI POTENSI BILAN DAERAH
2. PROSENTASE PENDUDUK MISKIN

TUJUAN RPJMD

1. Meningkatnya Produktifitas Sektor unggulan Daerah
2. Meningkatnya Cakupan Perlindungan social dan Kesejahteraan
sosia Masyarakat

SASARAN RPJMD

- 1.MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI
OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN DAERAH
Indikator : **Pertumbuhan Ekonomi**
2. MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
Indikator : **Prosentase Penduduk miskin**

TUJUAN
DISPERINAKER

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
Indikator : **PDRB Sektor Perindustrian**
- 2.Meingkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan sosial
Masyarakat
Indikator : **Tingkat Pengguran Terbuka**

SASARAN
DISPERINAKER

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

Indikator : Prosentase Pencari Kerja dan tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan peningkatan produktivitas

Kegiatan :

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi

Indikator : Prosentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelatihan berbasis kopetensi

Sub Kegiatan

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Kloster Kopertensi

Indikator : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kopetensi pada tahun n

2. Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga pelatihan

Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangkai optimalisasi kapasiatas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n

Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator : Prosentase Pencari Keja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja

1 Kegiatan :Pelayanan antar kerja didaerah Kab/kota

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja

Sub Kegiatan

- Perluasan Kesempatan kerja

Indikator : Jumlah Tenaga Keja yang di berdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja

- Penyelenggaraan unit pelayanan Disabilitas ketenaga kerjaan

Indikator : Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD

2 Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi informasi pasar kerja

Sub Kegiatan

JOB FAIR/ Bursa Kerja

Indikator : Jumlah Pecarii Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja

Program Hubungan Industrial

Indikator : 1. Prosentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja

2. Prosentase Penurunan Khusus perselisihan hubungan industrial

1. Kegiatan : Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yaqng hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota

Indikator : Prosentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait hubungan Industrial dan Pendaftaran perjanjian kerja Bersama

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan

Indikator : Jumlah data dan informasi sarana HI

(PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta dan Sostek serta pengupahan

2. Kegiatan : Pencegahan dan Peryelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perushaan di daerah kab/kota

Indikator : Prosentase penurunan khusus perselisihan hubungan industrial

Sub Kegiatan : Pecegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja,dan penutupan Perusahaan yang berakibat/bedampak pda kepentingan di satu daerah

Indikator : Jumlah Perselisihan di cegah

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator : Prosentase Kebutuhan, perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang di fasilitasi

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

Indikator : Prosentase Rencana Pembangunan industri yang dilaksanakan

Sub Kegiatan

1. Koordinasi, Singkrunisasi, dan Pelaksanaan Pebangunan sumber daya industri

Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkrunisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan sumber daya industri

2. Koordinasi Singkrunisasi, dan Pelaksanaan Pebangunan sarana dan prasarana industri

Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkrunisasi dan Pelaksanaan Pebangunan sarana dan prasarana industri

3. Koordinasi Singkrunisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat

Indikator : Jumlah dokumen hasil korodinasi Singkrunisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat

4. Evaluasi Terhadap PelaksanaanRrencana Pembangunan Industri

Indikator : Jumlah dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangnan industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator : Prosentase Izin usaha industri (IUI), Izin perluasan indusri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan sesuai ketentuan

Kegiatan : Penerbitan ilin uUaha Industri (IUI), Izin perluasan indusri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan sesuai ketentuan

Indikator : Prosentase Izin usaha industri (IUI), Izin perluasan indusri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan sesuai ketentuan

Sub Kegiatan

Koodinasi dan singkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kab/Kota

Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skla usaha indusri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu kab/kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negri dan selai bidang usaha tertentu yang menadi kewenangan pemerintah pusat

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional)

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri, untuk IUI, IPUI,IUKI,Dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota

Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional)

Sub Kegiatan

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan indusrti serta data lain lingkup kab/kota melalui system informasi industri nasional (SIINAS)

Indikator : Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan indusrti serta data lain lingkup kab/kota melalui system informasi industri nasional (SIINAS)

UTAMA/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	$\frac{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n)} - \text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}}{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}} \times 100\%$ Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).	Data Industri	Bidang Perindustrian
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$ Ket: Formal : Job Fair, CSR, Rekruter Informal : Pelatihan	Dokumen Data Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$ Ket : - Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja adalah perusahaan yang mempunyai PP/PKB/PKWT/SP/SP/LKS Bipartit - Jumlah total perusahaan adalah jumlah seluruh perusahaan di Kota Probolinggo	Data Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Hubungan Industrial
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial	$\frac{(\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n}) - (\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n-1})}{\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun n-1}} \times 100\%$ Ket : Kasus perselisihan hubungan industrial adalah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama ataupun anjuran	Data perjanjian bersama dan anjuran	Bidang Hubungan Industrial
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah) pada Disperinnaker sesuai ketentuan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025

Anggaran : Rp15.349.496.436,00

SUMBER DANA	Rp15.349.496.436,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 9.853.538.636,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp 5.431.307.800,00
Dana Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp 64.650.000,00

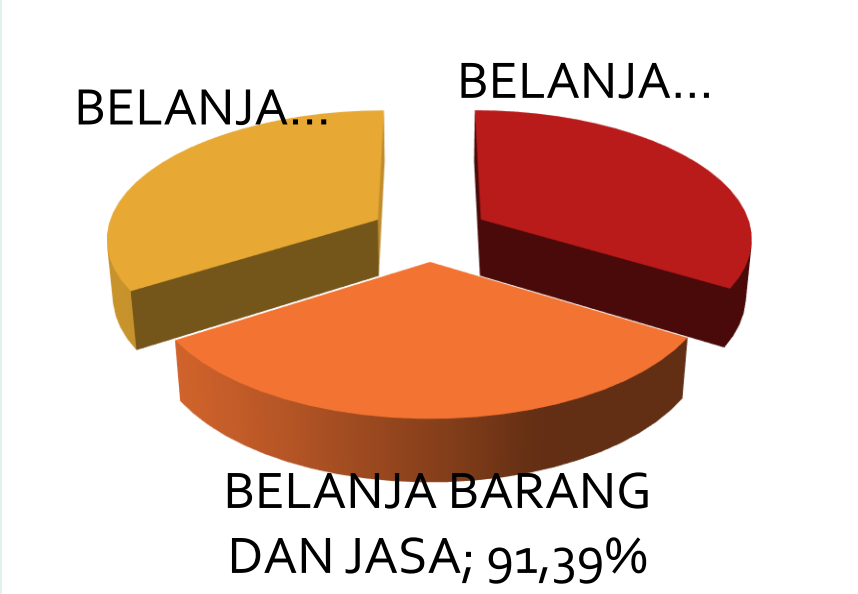
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 15.600.000,-
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Rp 15.600.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp 15.600.000,-
BELANJA OPERASI	Rp15.274.996.436,00
Belanja Pegawai	Rp.7.796.505.887,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.428.490.549,00
Belanja Hibah	Rp. 50.000.000,00
BELANJA MODAL	Rp74.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp74.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Jumlah Belanja	Rp15.349.496.436,00

Capaian Kinerja 2024

Uraian	Target	Capaian Kinerja
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50 M	49,97 M
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	93,30%	89,28%
Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	130%
Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%	19%

Realisasi Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI BULAN DESEMBER	PROSENTASE REALISASI %
1	BELANJA PEGAWAI	Rp 7.470.864.894	Rp 7.126.348.280	95,39%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 5.027.455.078	Rp 4.594.585.590	91,39%
3	BELANJA MODAL	Rp 164.600.000	Rp 158.400.000	96,23%
JUMLAH		Rp 12.662.919.972	Rp 11.879.333.870	93,81%



* PAD RPTKA : Rp 15.600.000 tidak terealisasi karena izin TKA berakhir tahun 2024 dan mulai izin baru di Kemenaker RI

Sekretariat

Anggaran : Rp. 8.875.379.142

Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 56.789.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.922.042.887
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 6.250.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.050.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 238.975.895
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 74.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 407.223.760
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 240.047.600

Sub Kegiatan	Anggaran
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 40.112.850
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 176.499.309
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 16.871.778
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 1.650.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 15.828.097
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 22.269.830

Bimtek Peningkatan Mutu Produk dan Kemasan	Bimtek Peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan kelompok sentra IKM	Sosialisasi HKI dan Standardisasi Industri
Fasilitasi Sertifikat Hak Merek bagi 20 IKM	Workshop Produk Batik, Kriya dan Industri Kreatif	Sosialisasi Implementasi Pengawasan Industri
Sosialisasi Penguatan kapasitas Industri dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Bimtek Penyampaian Laporan Industri melalui Siinas bagi IKM	Pemanfaatan rumah Batik sebagai pusat kegiatan kriya, batik dan industri kreatif
	Layanan Klik PRO (Klinik IKM Kota Probolinggo)	



Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Anggaran : Rp. 3.747.338.830

Sub Kegiatan	Anggaran
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 3.400.296.200
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 171.558.000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 38.332.630
Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 97.152.000
Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 40.000.000

Prioritas

Job Market Fair, memfasilitasi proses rekrutmen dan pengangkatan karyawan baru

Penguatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pemberian Bantuan Peralatan Kepada Masyarakat yang memiliki embrio usaha pada kegiatan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)

Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja, baik di sektor industri maupun informal (Sumber dana DBHCHT)

Kemitraan dengan DUDIKA, untuk memfasilitasi program magang, pelatihan on-the-job, dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri

Sistem Informasi Ketenagakerjaan, melalui platform digital yang mudah diakses, memberikan informasi terbaru tentang lowongan kerja, program pelatihan, layanan AK 1



Bidang Hubungan Industrial

Anggaran : Rp. 2.379.046.600

Sub Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 2.266.631.500
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.415.100

Prioritas

Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

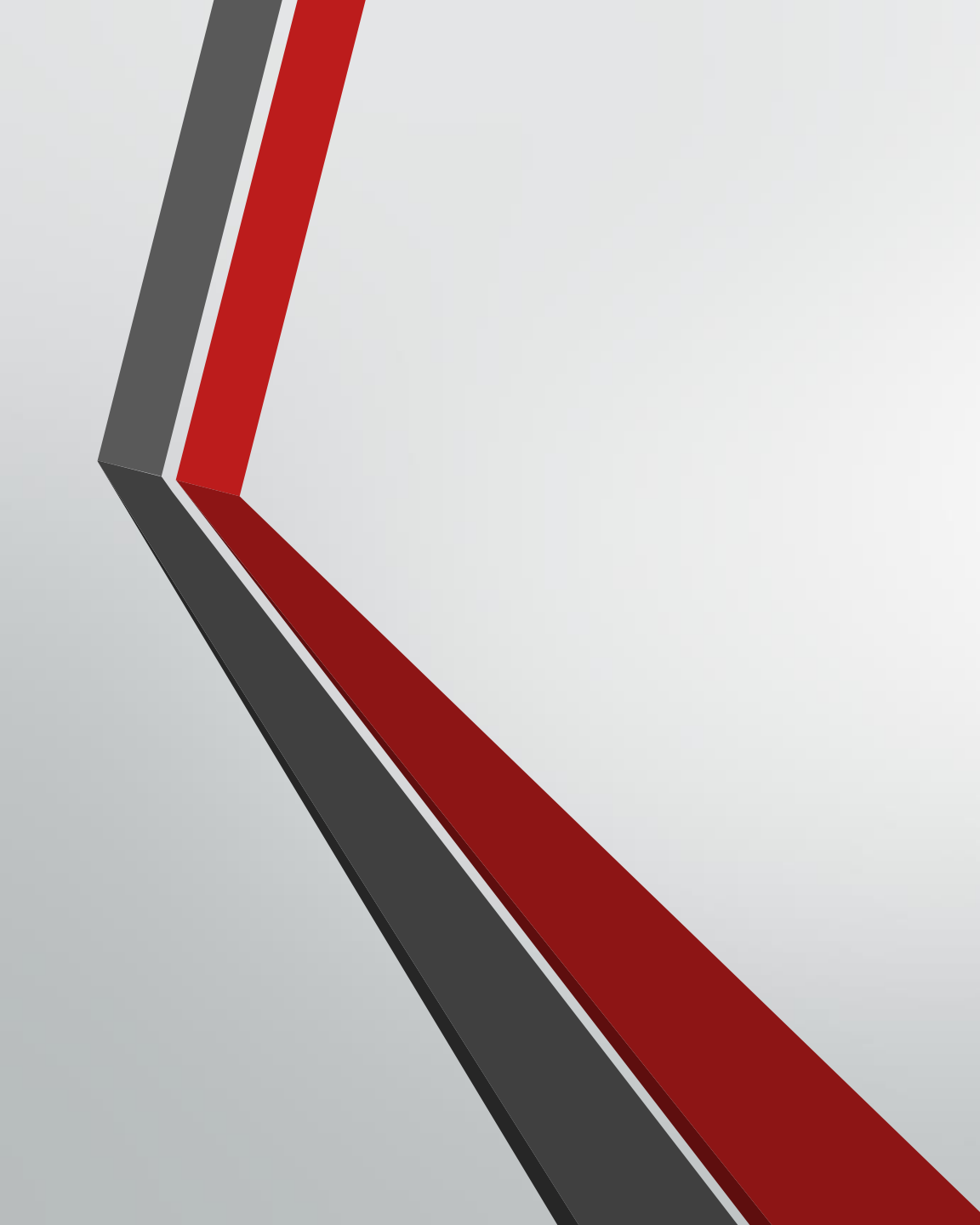
Sosialisasi syarat-syarat kerja, Upah Minimum, UMK

Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan dan Deteksi Dini

Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan







TERIMA KASIH